

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini bermakna bahwa pemerintah desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat desa.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama-sama BPD sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ditingkat pedesaan, maka keberadaan BPD selaku legislatif dalam pemerintahan di desa menyangkut masalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dimana BPD merupakan wadah menampung dan menelaah rencana dan kegiatan pelaksanaan secara fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan didalam kelangsungan pemerintah desa tersebut.

Desa sebagai organisasi pemerintah terendah dan sekaligus merupakan harapan pelaksanaan (implementasi) urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu pengkoordinasian dalam pemerintahan desa tersebut untuk mencapai pembangunan nasional. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005

pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Dari konsep pemerintahan desa dapatlah diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan untuk menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menciptakan pembangunan desa.

BPD dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif dalam kegiatan pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi pemerintahan desa. Dimana menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 pasal 34 yang menyatakan bahwa “BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat“. Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab didalam Pemerintahan Desa ini diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan atas pelaksanaan tugas Kepala Desa (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Melalui fungsinya sebagai legislatif pada Pemerintahan Desa, maka BPD mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan, BPD harus berlandaskan pada kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat desa yang diwakilinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Didalam UU No. 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.yang berperan strategis pada musyawarah desa adalah BPD, karena musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setren belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tugas pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat dari BPD yang diatur dalam undang-undang BPD di desa Setren terkesan hanya sekedar organisasi saja, banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti lambatnya pengurusan surat-surat, sering terlambatnya aparat desa seharusnya mendorong BPD untuk lebih memaksimalkan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (FKIP UMS). Keterkaitan tersebut terletak pada visi dan misinya dalam pembentukan karakter. Berdasarkan pada <http://fkippkn.ums.ac.id>, visi Prodi PPKn FKIP UMS adalah:

Menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pembelajaran bidang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta ketatanegaraan, untuk membentuk bangsa yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat madani.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang lebih kongkrit sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi pendidikan dan kewarganegaraan serta ketatanegaraan.
2. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui program pendidikan kepramukaan.

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa program studi PPKn FKIP UMS menanamkan pendidikan karakter yang kuat, sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa yang salah satunya adalah permasalahan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian penelitian ini selaras dengan visi

dan misi ProgdI PPKn UMS. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri selama ini?
2. Kendala apa yang ditemui ketika Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wongiri?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri selama ini.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang ditemui ketika Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wongiri.
3. Mendeskripsikan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

#### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
- b. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan, khususnya mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
- c. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

##### **2. Manfaat atau Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para pengambil keputusan terutama dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.
- b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya.